

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Semarang Sebagai Kota

Dalam membahas sebuah peristiwa bagaimana kampung-kampung di Semarang hadir dan terus bergerak, terlebih khusus seperti pada Kampung Sekayu dan Jayenggaten, maka perlu melihat bagaimana peristiwa kota itu sendiri tumbuh, Semarang pada awalnya hingga hari ini sebagai kota besar.

1. Kota Semarang Dan Sejarahnya



Gambar 4.1

Peta Wilayah Kota Semarang

(Sumber: Bappeda Kota Semarang)

Sebagai ruang kota, Semarang pada awalnya sebelum kedatangan para pendatang merupakan sebuah kampung nelayan dengan luas yang tidak cukup besar. Diawali pada tahun 1638 saka (1476 M) karakteristik wilayah yang berada di sekitaran bibir pantai menjadikan penduduknya bermata pencaharian sebagai penangkap ikan dan bercocok tanam. Wilayah ini terus berkembang pada abad ke 16 ketika penduduknya mulai mencapai angka 3000 jiwa, dan terkenal sebagai sebuah kota

pelabuhan penting di Pulau Jawa yang memperdagangkan rempah-rempah dan beras.

Dalam tulisan *Serat Kandangin Ringgit Purna Naskah KBG NR.7*, saat itu lahirnya Kota Semarang dengan datangnya utusan Kerajaan Demak Ki Pandan Arang yang mendapat tugas menyebarkan agama islam di wilayah Kerajaan Demak, di semenanjung Pulau Tirang yang sekarang berganti nama Mugas dan Bergota dan mendirikan pesantren bagi murid-muridnya (Liem, 1931). Daerah tersebut pada masa itu merupakan pelabuhan dan di depannya terdapat gugusan pulau-pulau kecil. Akibat pengendapan, yang hingga sekarang masih terus berlangsung, gugusan tersebut sekarang menyatu membentuk daratan. Bagian kota Semarang bawah yang dikenal sekarang ini dengan demikian dahulu merupakan laut. Pelabuhan tersebut diperkirakan berada di daerah Pasar Bulu sekarang dan memanjang masuk ke Pelabuhan Simongan, tempat armada Laksamana Cheng Ho bersandar pada tahun 1435 M. Di tempat pendaratannya, Laksamana Cheng Ho mendirikan kelenteng dan mesjid yang sampai sekarang masih dikunjungi dan disebut Kelenteng Sam Po Kong.

Dari waktu ke waktu daerah itu semakin subur, dari sela-sela kesuburan itu muncullah pohon asam yang arang (bahasa Jawa: *Asem Arang*), sehingga memberikan gelar atau nama daerah itu menjadi Semarang. Sebagai pendiri desa, kemudian menjadi kepala daerah setempat, dengan gelar Kyai Ageng Pandan Arang I. Sepeninggalnya, pimpinan daerah dipegang oleh putranya yang bergelar Pandan Arang II (kelak disebut sebagai Sunan Bayat atau Sunan Pandanaran II). Di bawah pimpinan Pandan Arang II, daerah Semarang semakin menunjukkan pertumbuhannya yang meningkat, sehingga menarik perhatian Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Karena persyaratan peningkatan daerah dapat dipenuhi, maka diputuskan untuk menjadikan Semarang setingkat dengan Kabupaten dan pada tanggal 2 Mei 1547 ditetapkan sebagai hari jadi Kota Semarang.

Semarang sendiri memiliki bentang alam yang dapat dikatakan khas, dimana karakteristik wilayahnya terbagi menjadi dua bagian, kota bawah dan kota atas. Kota bawah meliputi daerah dataran muara sungai hingga daerah perbatasan perbukitan, seperti halnya kampung Melayu di dekat pelabuhan sampai kampung Peterongan (pasar kambing). Yakni sekitar 4 kilometer dari garis pantai. Kawasan kota bawah seringkali dilanda banjir, dan di sejumlah kawasan, banjir ini disebabkan luapan air laut (rob). Bagian kota yang terdapat bangunan kota lama ini termasuk daerah pantai yang memiliki suhu agak panas.

Sedangkan kota atas meliputi perbatasan perbukitan hingga perbatasan Kota Ungaran, yakni kampung Jomblang hingga perbatasan kota, di antaranya meliputi Kecamatan Candi, Mijen, Gunungpati, Tembalang dan Banyumanik. Berbeda dengan bagian kota bawah, kota atas yang terdapat perumahan Gemeente Semarang Candi Baru ini memiliki hawa sejuk. Pusat pertumbuhan di Semarang sebagai pusat aktivitas dan aglomerasi penduduk muncul menjadi kota kecil baru, seperti di Semarang bagian atas tumbuhnya daerah Banyumanik sebagai pusat aktivitas dan aglomerasi penduduk Kota Semarang bagian atas menjadikan daerah ini cukup padat. Fasilitas umum dan sosial yang mendukung aktivitas penduduk dalam bekerja maupun sebagai tempat tinggal juga telah terpenuhi. Banyumanik menjadi pusat pertumbuhan baru di Semarang bagian atas, dikarenakan munculnya aglomerasi perumahan di daerah ini. Dahulunya Banyumanik hanya merupakan daerah sepi tempat tinggal penduduk Semarang yang bekerja di Semarang bawah (hanya sebagai *dormitory town*). Namun saat ini daerah ini menjadi pusat aktivitas dan pertumbuhan baru di Kota Semarang, dengan dukungan infrastruktur jalan dan aksesibilitas yang terjangkau. Fasilitas perdagangan dan perumahan baru banyak bermunculan di daerah ini, dan fasilitas pendidikan baik negeri maupun swasta. Dengan dukungan akses jalan tol dan terminal sebagai modal yang memperlancar

transportasi hingga pertumbuhan di daerah ini dikarenakan kondisi lahan di Semarang bawah sering terkena bencana rob banjir.

Letak Kota Semarang pun sangatlah cukup strategis, dimulai dari pantai Laut Jawa bagian tengah, yang membujur ke arah selatan. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal (jalur darat menuju Kota Jakarta), sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak (jalur menuju Kota Surabaya), sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang (jalur darat menuju Yogyakarta dan Surakarta, dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa yang terdapat pelabuhan untuk menghubungkan dengan pulau lainnya. Akses kemudahan menuju berbagai arah itulah yang menjadikan Semarang sebagai kota yang memiliki letak cukup strategis, terlebih pada masanya sebagai salah satu jalur pusat perdagangan di pulau Jawa.

Sebagai awal ataupun cikal bakal dari pemerintahan Kota Semarang yang sama sekali lepas dari Kabupaten Semarang berdiri tahun 1906 ketika pemerintah Hindia Belanda dengan Staatblad No. 120 membentuk pemerintahan *gemeente* (kota praja) yang dipimpin oleh seorang *burgemeester* (wali kota) yang kemudian berpusat di Jalan Bojong dimana hari ini merupakan Balai Kota. Sementara itu, Bupati Semarang tetap “bertakhta” di Kanjengan yang berlokasi di dekat alun-alun Semarang. Namun wilayah kekuasaan sang bupati berada di luar daerah perkotaan, lebih tepatnya di luar daerah yang dibatasi Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal Timur, dan gugusan Bukit Gombel.

Keputusan mengenai pembentukan Pemerintah Daerah Kota Semarang ditandatangani Gubernur Jendral J.B. Van Heutsz pada 21 Februari 1906. Penetapan itu menjadi faktor penting sebagai penggerak perkembangan Kota Semarang dari pedesaan tradisional menjadi perkotaan modern. Keputusan-keputusan Pemerintah Hindia Belanda selanjutnya makin mengukuhkan Kota Semarang sebagai daerah otonom yang secara perlahan-lahan akhirnya terlepas dari pemerintahan kabupaten.

Dasar peraturan tersebut adalah ketentuan yang tertera dalam Pasal 128 Indische Staatsregeling (semacam undang-undang dasar bagi pemerintahan Hindia Belanda) yang menyebutkan bahwa apabila keadaan mengizinkan, untuk suatu wilayah dapat diberi pemisahan dalam hal keuangan dari keuangan Pemerintah Hindia Belanda. Peraturan tersebut berlaku sejak 1 April 1906 dan sejak itu pula terbentuk sebuah kota yang otonom dengan sebutan Gemeente van Semarang (Nurhajarini, 2009: 411).

Pada tahun 1976 sendiri Semarang terjadi pemekaran wilayah kota yang awalnya hanya 99,4 km persegi menjadi 373,28 km persegi dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Dati II Kendal sebelah Timur (Kecamatan Tugu dan Kecamatan Mijen), juga sebagian wilayah Dati II Kabupaten Denak (Kecamatan Genuk), serta sebagian wilayah Dati II Kabupaten Semarang (Kecamatan Gunung Pati). Hingga kini total terdapat 16 kecamatan yang menduduki wilayah Semarang, yakni Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajah Mungkur, Semarang Selatan, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Barat, Tugu, dan Ngaliyan. Berikut tabel Luas Wilayah dan Jumlah penduduk Kota Semarang:

Kecamatan/ District	Luas Wilayah/ Area (Km²) Width of Area
Mijen	57,55
Gunungpati	54,11
Banyumanik	25,69
Gajah Mungkur	9,07
Smg. Selatan	5,928
Candisari	6,54
Tembalang	44,2
Pedurungan	20,72
Genuk	27,39
Gayamsari	6,177

Smg. Timur	7,7
Smg. Utara	10,97
Smg. Tengah	6,14
Smg. Barat	21,74
Tugu	31,78
Ngaliyan	37,99
Kota Semarang Semarang City	373,7

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kota Semarang
(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang)

Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Semarang Tengah	30,118	32,521	62,639
Semarang Barat	79,106	80,898	160,004
Semarang Utara	62,028	63,928	125,956
Semarang Timur	36,692	38,781	75,473
Gayamsari	36,971	37,187	74,158
Gajah Mungkur	29,637	30,443	60,08
Genuk	54,623	53,91	108,533
Pedurungan	93,582	94,356	187,938
Candisari	40,121	41,246	81,367
Banyumanik	67,906	68,96	136,866
Gunungpati	45,19	44,619	89,809
Tembalang	85,971	86,022	171,993
Tugu	16,518	16,355	32,873
Ngaliyan	68,244	68,547	136,791
Mijen	34,12	33,922	68,042
Semarang Selatan	37,234	38,523	75,757
Total	818,061	830,218	1,648,279

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kota Semarang, Desember 2016
(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Semarang)

Kota Semarang banyak dilintasi sungai, baik sungai besar maupun kecil. Sungai (Kali Semarang) yang berada di tengah kota pada zaman dahulu berfungsi sebagai sarana transportasi perdagangan laut. Seiring majunya perkembangan teknologi transportasi, aktivitas manusia dan perubahan alam, Kali Semarang sekarang hanya berfungsi sebagai irigasi di tengah kota. Di Teluk Bergota terdapat sebuah sungai dengan cabang-cabangnya. Pada hulu sungai dinamakan Kali Garang dan pada hilirnya dinamakan Kali Banjir Kanal Barat. Sungai ini bersumber dari kaki gunung Ungaran (2050 m), dan anak cabangnya adalah Kali Kreo dan Kripik.

Di perkampungan, sungai difungsikan tidak hanya sebagai irigasi, tetapi sebagai modal alam perekonomiannya (proto-industri). Seperti Sungai Bajak (Kanal Lamper) yang melewati perkampungan Tndang, Mrican, Lamper Mijen, dan Pandean Lamper yang masyarakat setempat memanfaatkannya untuk proses pembuatan tahu, tempe, dan tauge. Di wilayah yang masih terdapat sawah dan tambak, kali dimanfaatkan sebagai irigasi sawah maupun tambak. Selain sebagai basis ekonomi, sungai di perkampungan juga dijadikan sebagai tempat aktivitas sehari-hari penduduk seperti mandi, cuci, dan kakus.

2. Tumbuh Kembangnya Semarang Menjadi Kota Modern

Kota Semarang di bawah kekuasaan Kerajaan Demak berfungsi sebagai kawasan perniagaan dan penyebaran agama Islam dengan pelabuhannya yang sangat digemari oleh para pedagang. Saat itu pusat pemerintahan berada di daerah Bubakan (sekarang menjadi pusat perdagangan kawasan Jalan Mataram). Secara perlahan pelabuhan Semarang tampil di muka dan baru berhasil mengungguli tetangganya yakni Jepara Lama pada abad ke-18 (dalam Radjimo, 2013: 34). Dalam perkembangan yang lamban itu, di bawah Kerajaan Pajang, selanjutnya Mataram, pelabuhan Semarang berhasil menarik dengan datangnya bangsa-bangsa asing antara lain Cina (sejak awal abad ke-15), Hindia,

Arab/Persia (abad ke-16) dan Belanda (abad ke-17) menjadikan kota ini berpenghuni multietnis.

Kerajaan Demak runtuh, pusat pemerintahan berpindah ke Kerajaan Pajang (selanjutnya ke Kerajaan Mataram), Kota Semarang mengikuti arus perubahan politik tersebut, sebagai bagian dari kerajaan Pajang dan selanjutnya Kerajaan Mataram (1586). Tak lama di bawah kekuasaan Mataram, pusat pemerintahan terjadi pemberontakan Trunojoyo. Untuk menumpasnya, Sunan Amangkurat II berutang jasa kepada pihak asing. Raja Mataram itu membalas dengan menggadaikan wilayah Kota Semarang dan beberapa daerah pesisir lainnya, 15 Januari 1678. Tergadainya Kota Semarang merupakan kerugian besar bagi kerajaan Islam bercorak agraris yang berpusat di Yogyakarta itu. Berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan wilayah penting itu dan tak berhasil. Bahkan karena panasnya perpolitikan elite di pusat Kerajaan, Kota Semarang terpaksa beralih ke tangan asing. Dengan perjanjian tertanggal 5 Oktober 1705, setelah Suksesi Jawa I, Sunan Pakubuwono menyerahkan Kota Semarang. Raja Mataram ini memakai tahta dalam suksesi yang penuh berlumpuran darah (Budiman, 1976).

Akibat tergadainya Kota Semarang ke tangan VOC, maka fungsi kota berubah menjadi pertahanan militer dan perniagaan. Kawasan Semarang mulai menampakkan dirinya sebagai sebuah kota, di bawah kekuasaan pihak asing. Pada tahun 1758 tembok benteng pertahanan *de Europeesche Buurt* dibongkar untuk mengantisipasi perkembangan kota. Orang-orang Belanda mulai membangun vila-vila di Bojong dan Randusari. Pribumi membangun perkampungan di daerah Poncol, Randusari, Depok, dan lain-lain. Pemerintah mulai membangun jalan-jalan baru dan infrastruktur lainnya. Kota Semarang dibawah kolonialisme Belanda mengalami perkembangan ke arah kota modern dengan dibangunnya sarana dan prasarana untuk kepentingan kolonialismenya. Pada tanggal 16 Juni 1864 mulai dibangun jaringan kereta api jalur dari Semarang ke Solo, kemudian menuju ke Yogyakarta dan Selanjutnya

menuju juga ke Surabaya. Pada tahun 1884 mulai melakukan hubungan telepon dengan Jakarta dan Surabaya, dan 1862 dibuka Kantor Pos, serta memodernkan pelabuhan pada tahun 1875. Pada tahun 1906 kota ini mendapatkan kepercayaan untuk mengelola keuangannya sendiri (*Decentralitatie Wet*).

Semarang pun ditetapkan sebagai salah satu kota industri setelah penggalakan yang disetujui pembentukannya oleh Komisi untuk Pengembangan Industri yang bertugas untuk memajukan industrialisasi di Hindia Belanda Pada bulan September 1904. Pabrik dengan teknologi modern marak dibangun yang dimodali oleh pihak swasta maupun pemerintah. Sementara itu, industri kecil milik pribumi masih banyak yang beroperasi. Mereka mampu bersaing dengan perkembangan industri modern. Pada tahun 1909 para pengrajin yang masih eksis antara lain: pengrajin batik, pewarna biru, pembuatan alat-alat logam, pembuatan periuk atau belanga dari tanah liat, kulit, pakaian, dan pembuatan gong. Industri yang dikelola pemodal swasta tumbuh dengan pesat. Pada tahun 1905 terdapat 22 jenis hingga pada 1925 angkanya terus melonjak hingga terdapat 48 jenis industri. Pemerintah Gementee Semarang memegang usaha-usaha yang menyangkut pelayanan public seperti Perusahaan Air Bersih (1909), Pemadam Kebakaran (1908), Listrik (1913), Jasa Kebersihan Kota, Pasar Toko dan Restoran (1919-1920), Jasa Tram Kota (1921), Dinas Pemotongan Hewan (1929), dan Perumahan Rakyat (dalam Yuliati, 1997).

Cita-cita mewujudkan kota industri dan kota dagang dapat terwujud hingga terciptalah Kota Semarang sebagai kota kapitalis yang modern. Akan tetapi keberhasilan pembangunan kota ini tidak mampu menyelesaikan kependudukan baru. Industri yang membuka kesempatan bekerja mendorong para tenaga kerja dari daerah di luar Semarang untuk mengadu nasibnya di kota. Terlihat bagaimana pertumbuhan penduduk yang terjadi di Semarang sendiri, baik berdasar etnis maupun kependudukan pribumi.

Suku Bangsa/Th	1850	1890	1905	1920	1930	1941	1951	1961
Pribumi	20.000	53.974	70.000	126.628	175.457	221.000	317.360	*
Cina	4.000	12.104	14.000	19.720	27.423	4.000	10.246	*
Timur Asing	1.850	1.543	1.500	1.530	2.329	2.500		
Eropa	1.550	3.565	5.100	10.151	12.587	16.500	3.453	*
Jumlah	29.000	71.186	96.000	158.036	217.796	280.000	331.059	503.153

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Semarang Tahun 1850-1961

(Sumber: Berbagai sumber yang diolah; Indisch Verslag 1940, Semarang Beeld van Een Stad, Kantor Statistik Jawa Tengah)

Ket: *Tidak ada catatan pembagian berdasar suku

Dalam tabel data tersebut terlihat bagaimana peningkatan yang sangat tinggi dari tahun 1905-1920. Hal itu diduga karena banyaknya migrasi penduduk yang mencari pekerjaan di kota. Orang Eropa ke Hindia Belanda yang mencari pekerjaan mengalami peningkatan hampir 100% banyaknya, ini dikarenakan sektor perkebunan orang Eropa di Hindia Belanda mengalami peningkatan hasil produksi, yang pengolahan dan distribusinya dilakukan di kota dagang dan industri, seperti Semarang. Tak hanya orang Eropa yang mencari pekerjaan, orang-orang pribumi pun ikut mencari pekerjaan di kota. Pertambahan penduduk pada kurun tahun lima puluhan juga disebabkan semakin banyaknya migran ke kota. Selain untuk mencari pekerjaan juga karena dukungan situasi kota yang lebih aman (Tim Penyusun, 1984).

Peningkatan jumlah penduduk juga terjadi pada tahun 1950an, jika dibandingkan dengan tahun 1930 maka jumlahnya dua kali lipat. Ini juga disebabkan karena pendatang yang datang ke Semarang tidak kembali setelah keadaan tenang. Keinginan mereka untuk pulang ke desanya karena mereka telah mendapatkan pekerjaan di Semarang. Selain itu banyak juga para pejuang kemerdekaan yang datang ke Semarang ingin

membangun kehidupan baru di Semarang (Soekirno, 1952). Hingga yang terjadi adalah bertambahnya jumlah penduduk tetapi tidak dengan wilayah kota dan akhirnya berakibat pada semakin padatnya kota hingga menimbulkan masalah-masalah baru yang muncul.

Keberadaan Kota Semarang hari ini sebagai Ibu kota Propinsi Jawa Tengah memiliki visi yang berlandaskan kondisi kota dan nilai historis yang dimilikinya. Penentuan visi ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025 dan penelusuran jejak historis Kota Semarang sebagai kota niaga di mana pada jaman dahulu pernah dinyatakan sebagai Kota Niaga terbesar kedua sesudah Batavia. Berdasar sejarah sebagai kota niaga tersebut dan didukung oleh analisis potensi, faktor-faktor strategis yang ada pada saat ini serta proyeksi pengembangan ke depan, maka dirumuskan visi Kota Semarang yaitu: “Terwujudnya Semarang kota perdagangan dan jasa, yang berbudaya menuju masyarakat sejahtera”. Visi tersebut memiliki empat kunci pokok yakni Kota Perdagangan, Kota Jasa, Kota Berbudaya, dan Masyarakat yang Sejahtera.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatur perkembangan Kota Semarang yang sesuai dengan visi misi serta untuk menghadapi pertumbuhan yang pesat adalah diberlakukannya pembangunan pada tingkatan bagian wilayah kota (BWK). Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031 dikatakan bahwa BWK adalah suatu kawasan fungsional atau kawasan yang memiliki kemiripan fungsi ruang. Kota Semarang terbagi menjadi 10 bagian wilayah kota dengan masing-masing BWK memiliki fungsi kawasannya tersendiri. Sesuai dengan visi misi Kota Semarang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, BWK 1 merupakan pusat kawasan yang memiliki fungsi perkantoran, perdagangan, dan jasa dengan kawasan segitiga emas (Pemuda, Pandaran, Gajahmada) serta Simpang Lima sebagai pusat kegiatannya atau CBD (Central Business District). BWK 1 ini

mencakup Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Selatan, dan Semarang Timur dengan luasan 2.223 Ha. Saat ini kawasan CBD Pandama telah berkembang menjadi pusat perdagangan dan jasa yang lebih luas menjadi Kawasan Petawangi (Peterongan-Tawang-Siliwangi), dalam Hermawan dan Syahbana (2015: 38-50).

3. Problematika Semarang Abad ke-20

Pada awal abad 20 ketika Semarang ditetapkan sebagai kota otonom telah muncul berbagai permasalahan yang menyelimutinya, seperti masalah kependudukan, Pemerintahan Gemeente Semarang tidak otomatis secara langsung dapat menyelesaikan permasalahan perkotaan saat itu. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan maraknya migrasi berimbas pada masalah permukiman, kesehatan lingkungan dan higienitas. Seperti Franscois Valentijn dalam buku modernitas dalam kampung yang mengatakan saat dirinya berkunjung ke Semarang pada awal abad ke-18 menggambarkan kondisi permukimannya; rumah Bupati Semarang dengan kondisi bangunan rumah besar-besar dan tinggi yang melintasi sungai (sebelah barat kali Semarang), juga terdapat masjid dan pasar. Sementara pedagang Eropa dan pembantunya menempati permukiman yang luas dengan benteng yang berbentuk segi lima, berpagar tonggak-tonggak runcing, dan dinding papan nama lima sudut yakni Raamsdonk, Bunschoten, Zeeland, Amsterdam, dan Utrecht.

Dalam perkembangannya, permukiman orang Eropa pertama di Kota Semarang dikenal sebagai *Oude Stad* (kota lama) atau *Europesschebuurt* (permukiman Eropa). Permukiman Eropa ini bersebalahan dengan Permukiman Cina (sebelah timur). Tidak jauh dengan rumah bupati Semarang terdapat kampung Melayu (perkampungan pendatang), sedangkan perkampungan Cina yang berseberangan dengan perkampungan Jawa berada di sebelah timur kali Semarang (Yulian, 2003). Permmukiman Eropa dengan benteng sehilimanya ini muncul setelah perjanjian antara Raja Mataram Amangkurat II dengan VOC pada Oktober 1677 dan Januari 1678

meskipun disesali dalam perkembangannya setelah tahun 1708. Di sebelah timur benteng muncul permukiman baru yang dihuni oleh pegawai-pegawai VOC (Eropa) dan warga kota lainnya. Perkembangan permukiman mewah ini terbentuk dengan percampuran beragam budaya dalam struktur bangunan yakni antara Belanda, Portugis, Perancis, Nusantara dan Cina. Hal initerlihat pada bentuk gaya bangunan rumah yang hadir.

Namun saat bangkrutnya VOC pun tidak mempengaruhi struktur permukiman di Semarang. Bahkan, penggantinya memperkuat karakter kebijakan yang diskriminatif. Kebijakan yang tidak adil oleh pemerintahan Hindia Belanda. Terlihat adanya perbedaan ras penduduk. Tiga kelompok ras utama yang dibedakan adalah ras orang Eropa, ras Timur Asing dan terakhir pribumi. Perlakuan yang tidak adil tersebut diwujudkan pula pada tata ruang permukiman.

Ketika Semarang berorientasi pada ekonomi dan politik, pusat-pusat strategis kota masih di huni oleh kelompok ras pertama atau penguasa yakni orang-prang Eropa. Mereka bertempat di wilayah *Zeestraat* (Sekarang jalan Kebon Lau yaitu Poncol, Pendrikan, dan kawasan kota lama (timur jembaran Berok). Sedangkan kelompok ras kedua yakni Cina dan orang Timur Asing menempati kampung-kampung yang sudah ditentukan. Ras Cina yang berada di kampung Pecinan, India atau Koja yang beradai di kampung Pekojan dan arab berada di kampung Kauman. Selain di tempat khusus tersebut, masyarakat kelompok kedua ini juga berbaur dengan penduduk pribumi, tapi dalam pengawasan. Kondisi permukiman mereka berbeda dengan permukiman kelompok orang-orang Eropa sebab terjadi ketidakmerataan dalam hal pembangunan permukiman. Meskipun rumah yang ditempati oleh mereka terbuat dari tembok permanen, namun kondisinya sangat memprihatinkan. Keadaan lingkungan yang kotor, pembuangan limbah yang sangat tidak tertata, banyaknya kotoran hewan dan manusia, serta kekurangan air bersih.

Dan terakhir bagi kelompok ras mayoritas yang berada pada posisi kelompok ketiga yaitu orang-orang pribumi tinggal di pinggiran kota, namun tetap dekat dengan akses jalan raya. Misalnya di kampung Lamper Lor, Lamper Tengah, Lamper Kidul, Lamper Sari, Lamper Mijen, Peterongan, Sompok, Jomblang, Karangsari, Pandean, Sayangan, Plampitan, dan lainnya. Pribumi yang berasal dari kota lain menempati wilayah tempat dimana mereka bekerja, seperti mereka yang bekerja sebagai pedagang dan nelayan berada di dekat pelabuhan yakni kampung Melayu. Rumah yang ditempati bagi kaum pribumi pun tidak lebih baik, dengan dinding semi permanen dan non-permanen, terbuat dari kayu dan *gedhek*. Untuk yang berada di dekat dengan pusat kota mereka harus bertempat tinggal dengan cara berhimpitan, sehingga di awal abad ke-20 muncul berbagai wabah karena sanitasi yang buruk.

Hal tersebut juga diakibatkan karena lingkungan industri yang bercampur menyatu dengan permukiman rakyat, terlihat pada wilayah kampung Petudungan, Plampitan, Pekunden, Sayangan Pandean, Gabahan dan lainnya. Penggunaan lahan kota yang diperuntukan sesuai kepentingan penguasa dan pemodal berpengaruh terhadap pembangunan fisik bagi kesehatan lingkungan. Perkampungan pribumi dengan sanitasi buruk, suplai air minum yang tidak memadai, cahaya dan ventilasi udara segar berkurang, serta bahaya banjir yang selalu menghantui di saat datangnya hujan.

Melihat kenyataan saat itu memang abad ke-20 menjadi perkembangan permukiman yang sangat pesat di Semarang, namun hanya bagi kaum Eropa. Kebanyakan dari mereka orang-orang Eropa kaya di Semarang memiliki rumah yang bagus di tepi jalan besar dengan halaman yang luas dan fasilitas komplit. Kontras, berbanding terbalik dengan rumah kebanyakan orang pribumi. Kondisi kampung-kampung yang becek, jalan yang sempit dan kotor, berdebu di musim kemarau, dan menjadi rawa di musim hujan. Rumah mereka terbuat dari kayu dan bambu, sanitasi sederhana, sumur umum dan juga tanpa fasilitas

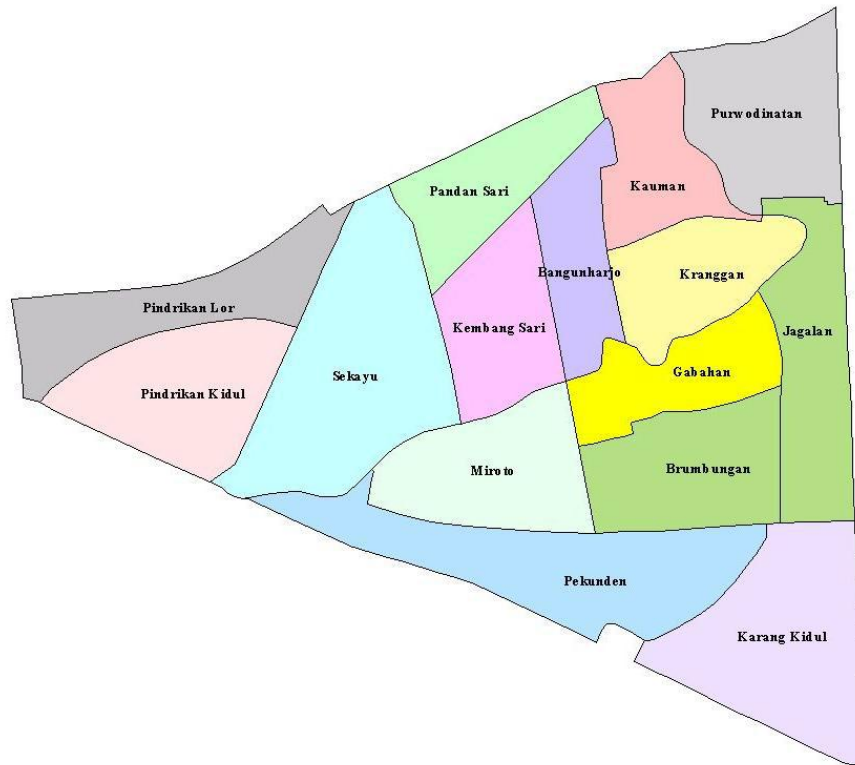
memadai. Orang Eropa yang tertarik dengan pesatnya perkembangan kota membeli tanah-tanah di sepanjang jalan utama, yang semula perkampungan penduduk pribumi. Sementara penduduk yang tanahnya terpaksa di jual harus berpindah ke kampung lain. Tanah kampung penduduk pribumi yang pertama kali terpaksa disewakan (kemudian dibeli) kepada pengusaha Eropa adalah kawasan Bojong dimana hari ini menjadi Jalan Pemuda. Penduduk pribumi pun harus pindah ke arah selatan, di kawasan Bulu. Kawasan Bulu ini selanjutnya menjadi padat, selain di bangun villa juga rumah mewah yang berhalaman luas serta perumahan bagi pegawai Eropa (Radjimo, 2013).

B. Mereka Yang Hidup di Kota dan Kota Dalam Hidup Mereka

Kampung Sekayu dan Kampung Jayenggaten keduanya berada di wilayah Kecamatan Semarang Tengah. Kampung Sekayu terletak di bagian selatan Kelurahan Sekayu dan berbatasan langsung dengan jalan arteri sekunder Jalan Pemuda dan Jalan M.H. Thamrin. Sedangkan Kampung Jayenggaten terletak di bagian selatan Kelurahan Kembangsari dan berbatasan langsung dengan Jalan Gajahmada sebagai jalan arteri sekunder. Kedua Kampung tersebut terletak di kawasan Segitiga Emas yaitu berada di antara Jalan Pemuda, Jalan Gajahmada dan Jalan Pandanaran.

Kampung Sekayu dan Kampung Jayenggaten dipilih berdasarkan klasifikasi kampung kota serta perubahan pola permukiman terkait perkembangan kawasan perdagangan dan jasa di kawasan Segitiga Emas. Secara umum kecamatan Semarang Tengah merupakan salah satu Kecamatan yang dapat dikatakan tergolong padat penduduk, karena merupakan pusat pemerintahan di Kota Semarang. Letak geografisnya pun berada diantara 6°50'-7°20' Lintang Selatan dan 109°50'-110°35' Bujur Timur. Kecamatan Semarang Tengah dibatasi oleh sebelah utara kecamatan Semarang utara, sebelah selatan kecamatan Semarang selatan, sebelah timur kecamatan Semarang timur, sebelah barat kecamatan Semarang barat. Kecamatan Semarang Tengah mempunyai luas penggunaan bangunan 589.736 ha, dari jumlah keseluruhan daerah yaitu 604, 808 ha, sehingga kondisi kecamatan ini

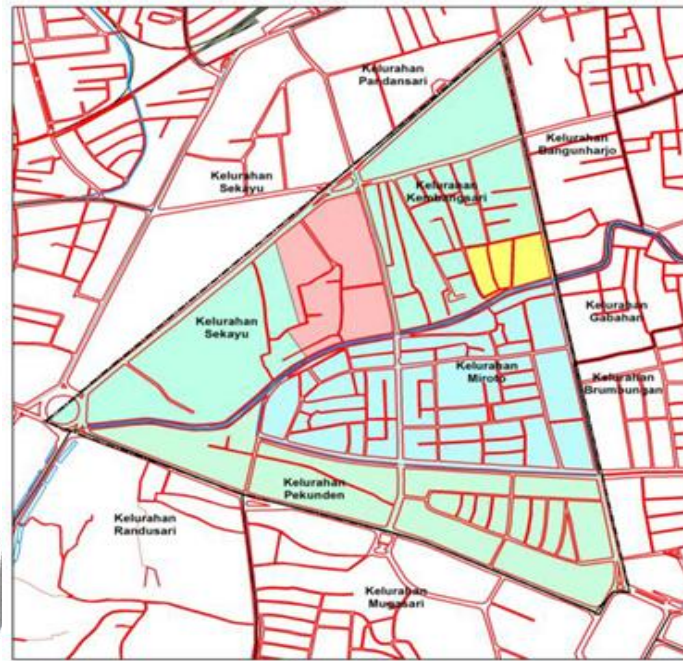
sangat padat dan tidak terdapat area persawahan. Luas daerah terdiri dari pekarangan bangunan atau emplasement seluas 589.736-ha, lapangan olahraga seluas 10.924 ha dan taman rekreasi seluas 4.092 ha.



Gambar 4.2

Peta Wilayah Kecamatan Semarang Tengah
(Sumber: Bappeda Kota Semarang)

Kecamatan Semarang Tengah terbagi menjadi 15 Kelurahan, 75 Rukun Warga (RW) dan 488 Rukun Tangga (RT). Kelurahan-kelurahan tersebut antara lain kelurahan Purwodinatan, Kauman, Kranggan, Jagalan, Brumbung, Gabahan, Karang Kidul, Pekunden, Miroto, Bangunharjo, Kembang Sari, Pndan Sari, Sekayu, Pindrikan Lor, dan Pindrikan Kidul. Jika dilihat berdasar jenis usaha industri yang terdapat di Kecamatan Semarang Tengah mayoritas bertumpu pada perdagangan/wirusaha, yang merupakan potensi yang cukup besar untuk meningkatkan perekonomian di Kota Semarang. Terdapat 197 buah industri kecil yang memiliki tenaga kerja 5.570 orang, dan industri rumah tangga sebanyak 21.791 buah dengan memiliki tenaga kerja 19.062 orang.



Gambar 4.3
Peta Wilayah Segitiga Emas
(Sumber: Bappeda Semarang)

Sebagai awal kampung-kampung di Semarang mulanya hadir akibat para pedagang atau saudagar-saudagar Cina yang datang melalui jalur laut, yakni kawasan pelabuhan. Dalam bahasa Cina-nya mereka disebut dengan *Kongkowan*. Sekitar tahun 1800an mereka hadir untuk berdagang di Semarang dan membentuk suatu kawasan tempat tinggal bagi mereka sendiri. Kampung Melayu dan kawasan Sam Poo Kong menjadi salah satu titik awal persinggahan dan pendirian kampung sehingga daerah tersebut adalah kampung-kampung awal yang ada di Semarang. Dalam sejarah Lim Tyan Joo sendiri pun dijelaskan bahwa itu merupakan masa-masa orang Tiongkok, termasuk sejarah pendirian pemberian nama. Nama-nama yang digunakan pada kampung di Semarang biasa menggunakan nama-nama perorangan, terlebih khusus adalah pada nama-nama mereka, orang Cina.

Pemukiman-pemukiman tersebut pada akhirnya menjalar hingga ke tengah kota dan hingga saat ini menjadi kampung asli kota Semarang. Tepatnya adalah kawasan yang didalamnya terdapat kampung asli mayoritas

hanya ada di wilayah Semarang bagian utara dan tengah, karena selain di kawasan tersebut belum ada kampung yang terbentuk. Dari kedua kawasan tersebut masih terbagi menjadi empat bagian, yaitu kawasan Kampung Melayu, kawasan Pekojan, kawasan Mataram dan kawasan Bodjong yang kini berubah menjadi jalan Pemuda.

1. Kampung Sekayu

Penamaan atas Sekayu merupakan sebuah singkatan yang berasal dari kata “Sentral Kayu”. Dimana dulunya Sekayu atau juga yang di kenal dengan Kampung Pekayuan adalah pusat pangkalan kayu jati yang berasal dari wilayah-wilayah di sekitaran Semarang. Kendal, Grobogan, Ungaran, Solo, dan Wonogiri misalnya, daerah-daerah tersebut pada masanya memasokkan atau menimbun hasil kayu jati di wilayah Kampung Sekayu. Hal tersebut dapat terjadi karena memang berdasarkan wilayahnya, keberadaan Kampung Sekayu terletak di pinggir atau di samping Kali Semarang, yang merupakan jalur lintas perahu dan kapal.

Kampung Sekayu sendiri dapat dikatakan bahwa pemukiman tersebut merupakan salah satu kampung tua yang ada di Semarang. Terlihat jelas dengan adanya aset fisik bangunan masjid tua yang berdiri sejak 1413 hingga sekarang, yakni Masjid Sekayu. Pada awalnya ketika Ki Ageng Pandanaran baru menjabat sebagai bupati, pemilihan kantor gubernur ditempatkan di Sekayu dimana sebelumnya beliau tidak sepakat atas penempatan kantornya di Kauman dan Masjid Sekayu menjadi jejak yang ada hingga kini.

1.1. Keberadaan Kampung Sekayu

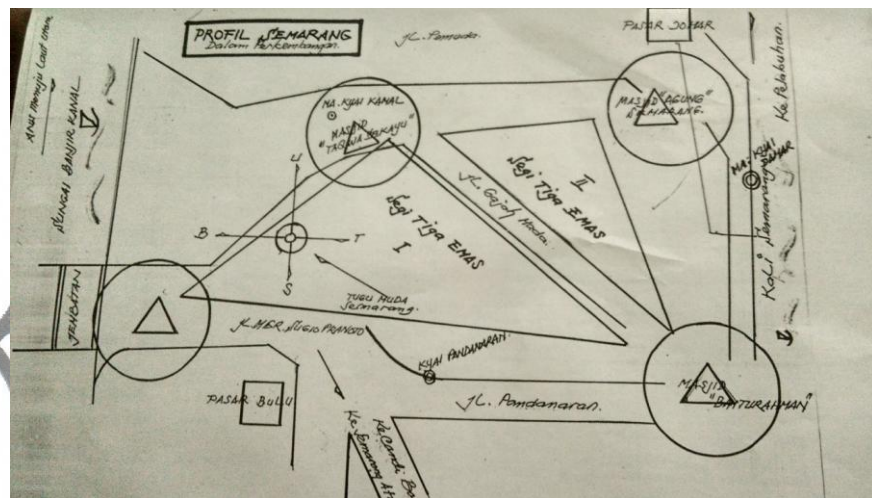
Hari ini keberadaan kampung-kampung di Semarang semakin mengkhawatirkan dan rentan dalam kesirnaan. Kepentingan ekonomi berbicara ketika kawasan bersejarah atau kampung asli Semarang yang memiliki cerita, budaya, dan kearifan lokalnya telah hilang satu persatu. Semisal pada sebagian wilayah RT di

Kampung Sekayu yang berada di Jl. Pemuda, Semarang Tengah hari ini telah hilang dan berganti dengan megahnya bangunan Mega Supermall Paragon. Dari total 8 RT yang berada di wilayah tersebut, RT 1 hanya tinggal cerita disaat kampung tersebut sudah tidak ada dan digunakan sebagai lahan parkir bagi mall yang ada di sebelahnya. Sekitar 29 bangunan hilang dan hanya tersisa 1 bangunan, yakni kantor Kelurahan Sekayu. Dalam peraturan daerah dijelaskan bahwa kawasan tersebut memang sudah tidak diperbolehkan lagi sebagai digunakan wilayah pemukiman, melainkan harus dipakai sebagai wilayah kantor dan usaha. Oleh karena itulah mengapa yang tersisa hanya satu bangunan, kantor kelurahan.

Melihat hal itu, kampung-kampung yang berada di kawasan Segitiga Emas adalah kampung yang menjadi sasaran empuk bagi para pengusaha investor. Kawasan Segitiga Emas atau yang biasa merupakan kawasan yang menjadi pusat bisnis Kota Semarang sejak tahun 2006 meliputi Jalan Pandanaran, Jalan Pemuda dan Jalan Gajahmada. Terdapat beberapa pusat perbelanjaan modern dan kantor pemerintahan di Jalan Pemuda. Pusat oleh-oleh khas Semarang di sepanjang Jalan Pandanaran serta kawasan perdagangan jasa modern di sepanjang Jalan Gajahmada. Kepentingan ekonomi dinilai lebih tinggi dibandingkan sejarah, bangunan yang memiliki cagar budaya, ataupun kampung yang merupakan cikal bakal sebuah kota tumbuh dan berkembang. Bukti konkret juga dapat dilihat dengan jelas pada terdusurnya Gedung Kesenian Rakyat atau GRIS yang awalnya berdiri tepat di kaki gedung Mega Supermall Paragon hari ini.

Lantas kemudian seperti apa yang dikatakan oleh Pak Edi, salah seorang warga yang kini menjabat sebagai Ketua RT bahwa kenapa Sekayu menjadi penting adalah yang pertama karena Sekayu ada. Keberadaan Kampung Sekayu sendiri sudah sangat

penting bagi dirinya dan masyarakat. Fungsi tempat tinggal, tempat mata pencaharian dan kemudian juga sebagai tanah kelahiran beliau serta sanak saudara dan orang tuanya. Lalu disamping itu, menjadi penting karena Sekayu dikriteriakan sebagai kampung kuno dan bersejarah dimana dengan keberadaan masjid Sekayu.



Gambar 4.4

Posisi Penting Kampung Sekayu Dalam Segitiga Emas

(Sumber: Dokumen pribadi Bapak Arief)

1.2. Berganti Wajahnya Kampung Sekayu

Pertanyaan besar yang muncul di dalam benak, lantas bagaimana keadaan kampung-kampung yang meninggalkan wilayahnya, bagaimana keadaan fisik wilayah tersebut berganti, kemana para warga berpindah, apa pengaruh bagi kehidupan sosial atau ekonomi mereka, serta bagaimana arti penting atas kampung itu sendiri. Begitu banyak pertanyaan yang dapat hadir ketika wajah kota silih berganti. Dengan raut wajah yang mungkin agar dapat dikatakan segar, maka secara otomatis kampung-kampung yang berada di tengah kota harus terpaksa meninggalkan sejarahnya. Penataan wilayah berdasarkan peraturan daerah atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kota mengharuskan mereka angkat

kaki. Dengan istilah kasar maka warga harus bermain judi dengan para investor.



Gambar 4.5
Tampak Luar Mall Paragon
(Sumber: Dokumen Pribadi)

Di kemudian hari warga meninggalkan kampungnya dan mereka harus pindah ke wilayah lain. Tanah, kenangan, dan sejarah yang mereka miliki ditukarkan dengan sejumlah materi. Dan akhirnya, kampung-kampung yang hadir di tengah kota hanya sebagai cerita dan sejarah pada hari ini. Warga angkat kaki dan berpindah ke daerah pinggiran. Mereka membangun ulang sejarah mereka, kampung-kampung baru hadir di pinggiran Semarang. Semakin lama orang tidak lagi mengenal Kampung Sekayu, Kampung Jayenggaten atau lainnya, yang di kenal adalah Mall Paragon, Hotel Gumaya, dan atau bangunan tinggi lainnya sebagai ikon atas kota.

Perubahan Fisik Spasial

Dalam perubahan yang terjadi atas apa yang di alami oleh Kampung Sekayu maka tentu akan dapat sangat terlihat dengan kasat mata jika melihat kondisi fisik kampung tersebut hari ini.



Gambar 4.6

Lahan Parkir Mall Paragon

(Sumber: Dokumen Pribadi)

Pertama, bentuk pemanfaatan lahan ditunjukkan melalui transformasi pola aktivitas penggunaannya dan luasan lahan. Tentu di Kampung Sekayu sendiri terjadi perubahan dimana awalnya daerah tersebut adalah wilayah RT 1 RW 1 Kelurahan Sekayu yang dipakai sebagai rumah atau tempat tinggal bagi warga, kini berubah dan berganti wajah menjadi bagian dari proses pembangunan pusat kota dengan wilayah bisnis, yakni bangunan tinggi mall atau secara spesifik berganti menjadi lahan parkir bagi pengunjung pusat perbelanjaan tersebut.

Tepat di samping Mall Paragon yang digunakan sebagai lahan parkir, dalam pemanfaatannya juga dipakai sebagai tempat berjualan oleh warga sekitar. Membuka warung mie ayam, soto, nasi rames, dan lain sebagainya merupakan pilihan bagi masyarakat sekitar dalam memanfaatkan para pegawai yang bekerja di Mall pada jam makan siang ataupun malam. Termasuk

masyarakat kampung yang berada di sebelah kampung Sekayu, yakni Kampung Bedagan.

“Kita memanfaatkan keadaan mas, di situ kan banyak pegawai-pegawai dari paragon, pasti mereka butuh makan, jadi kita buka warung soto aja di samping sini”, Ujar Ibu

Kus.



Gambar 4.7

Lahan Parkir Mall Paragon

(Sumber: Dokumen Pribadi)

Kemudian adalah karakteristik jalan, ditunjukkan melalui perubahan pola dan fungsi jalan. Jalan-jalan yang pada hari ini pun berubah, jalan semakin sempit dan berdesakan yang dipakai untuk membuka lapak atau warung oleh masyarakat. Baik itu yang berada di sebelah mall ataupun yang berada di belakang. Hal tersebut juga berakibat pada jalan yang semakin ramai oleh kendaraan bermotor yang lewat. Kondisi jalan yang semakin ramai akibat banyaknya penduduk dari luar yang masuk menambah hiruk pikuk di gang jalan itu. Karakteristik Kampung Sekayu yang tidak memiliki lahan lebar yang dapat digunakan sebagai tempat bermain anak-anak pun sekarang sudah mulai berubah. Dahulu jalan juga digunakan sebagai tempat bermain, berlari-lari dan bersepeda

namun hari ini kian berubah dengan adanya kendaraan yang semakin banyak.

Anak-anak tidak lagi berlarian kesana kemari. Melihat kanan kiri di gang sempit perkampungan menjadi potret baru yang dapat di lihat di Kampung Sekayu. Bagaimana tidak, lalu lalang motor dari para pekerja yang bertempat tinggal kos di kampung menjadi ancaman tersendiri bagi mereka.

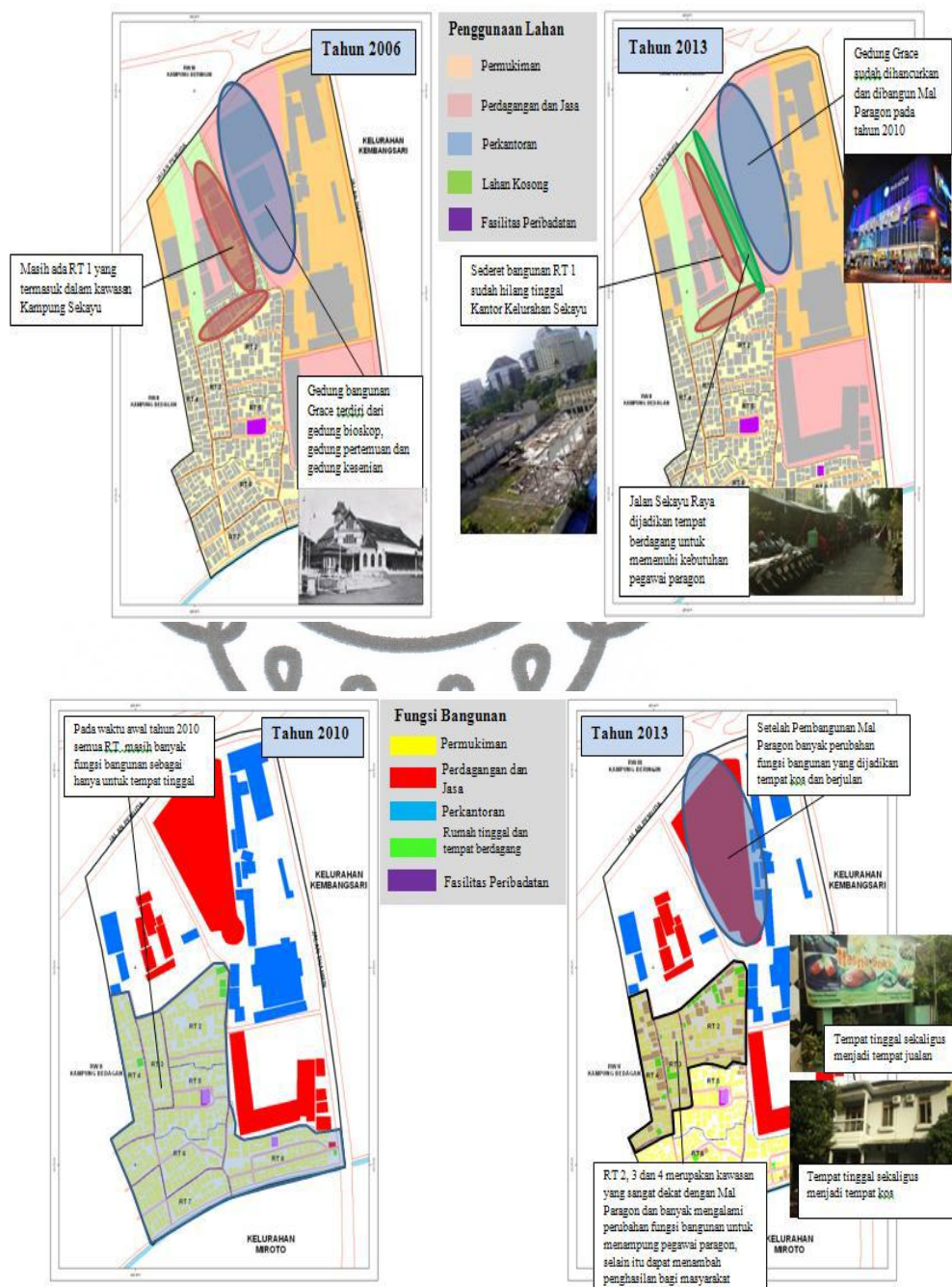
“Ya untuk anak-anak kecil yang ada di kampung udah ga bisa main sebebas dulu mas waku jaman saya masih kecil.

Kecilan saya main kan tinggal main depan rumah, mau muter muter di kampung juga aman-aman aja engga ada motor yang wara wiri. Lah kalau sekarang mas liat aja itu sendiri tiap hari kan gimana motor lewat. Ada yang lewat cuma karena mau motong jalan, ada yang anak kosan yang tinggal disini”, ujar Pak Edi.

Melihat kondisi hari ini memang menjadi problematik tersendiri bagi ruang bermain anak. Mereka dipaksa untuk tetap waspada akan apa yang ada di sekitar mereka. Jika di lihat secara garis besar, hal itu merupakan salah satu dampak langsung yang timbul bagi masyarakat yang benar-benar berada di tengah kota.

Ketiga, karakteristik bangunan yang mana beralih fungsi. Jika melihat RT 1 RW 1 sendiri maka sudah tidak ada bangunan disana, hanya satu bangunan kantor kelurahan saja. Namun disaat melihat RT dibelakangnya ataupun Kampung Bedagan yang berada disebelah Kampung Sekayu maka terlihat banyaknya bangunan rumah yang sudah beralih fungsi menjadi tempat usaha. Rumah-rumah tempat tinggal yang berganti menjadi kos-kosan, beralih fungsi menjadi warung makan, tempat *laundry*, dan usaha-usaha lainnya. Bangunan rumahnya pun menjadi bagus karena yang tadinya rumah biasa kemudian dijadikan kos-kosan.

Pembangunannya dari depan hingga belakang sudah tidak ada rumah asli, hanya satu dua. Rumah-rumah peninggalan orang tua ataupun kakek-nenek juga telah renovasi total, padahal dulu itu termasuk jati semua.



Gambar 4.8

Penggunaan Lahan Kampung Sekayu

(Sumber: Analisis Penyusun Jurnal Ruang Vol.2 No.1)

Sedangkan yang terakhir ditunjukkan melalui perubahan kepadatan bangunan. Jelas bahwa dampak lain dari pertumbuhannya Mall Paragon adalah semakin banyaknya penduduk luar yang masuk ke dalam dan dengan otomatis semakin banyaknya bangunan rumah yang akan dibangun untuk kos-kosan atau usaha lainnya. Mereka bertempat tinggal menghuni kos-kosan yang ada di sekitar mall tersebut dengan pandangan akses jarak yang ditempuh adalah dekat. Bangunan-bangunan pada sekitarnya pun semakin menambah memadat. Baik yang menempati lahan kosong ataupun membuat rumahnya menjadi tingkat.

Perubahan Sosial dan Ekonomi

Nilai-nilai sosial, pola perilaku, organisasi, lapisan sosial, maupun kekuasaan yang berlaku tentu mengalami efek atas perubahan. Seperti yang terjadi di Kampung Sekayu bagian belakang, banyak penduduk dari luar yang masuk ke dalam kampung, namun warga kampung asli yang berada disana malah keluar karena dampak rumah-rumahnya dikos-kosin. Hampir kebanyakan warga pun sadar bahwa kenyamanan tidak lagi berjalan beriringan di kampungnya. Rasa aman, nyaman, tentram telah jauh berubah. Sehingga yang mereka lakukan adalah mereka menyewakan rumahnya.

“Saya punya rumah 2 mas, yang di Bedagan (kampung di sebelah Sekayu) itu saya gunakan untuk rumah kos.

Masnya tau sendiri kan kalau disana itu sekarang ramainya kayak apa, bikin pusing mas, jadi saya pindah ke rumah saya yang satunya aja”, bilang Ibu Novi.

Ataupun dari segi ekonomi dimana kondisi mata pencaharian, jumlah pendapatan pengeluaran, kemampuan masyarakat dalam menyisihkan uang untuk menabung juga berubah. Seperti juga pada keorganisasian yang hari ini mulai berkurang, anak-anak

remaja pada karang taruna yang semakin hilang pula. Belum lagi kegiatan Arisan RT, RW dan PKK dimana sekarang anggotanya semakin sedikit dengan keadaan mereka yang juga pindah keluar dari kampungnya. Tidak adanya ruang terbuka sebagai tempat pertemuan menjadi dilema sendiri. Biasanya jikalau pertemuan mereka menggunakan rumahnya masing-masing, gelar *kloso* di halaman ngobrol-ngobrol ya seperti itu. Namun mereka hari ini sadar dengan pengalihan fungsi rumahnya sebagai kos-kosan. Hal ini pun menjadi hal yang membatasi warga untuk saling berinteraksi sosial.

Lebih dari itu adalah sisi keamanan. Sisi keamanan itu menjadi sangat mengkhawatirkan dan semakin membuat resah. Banyak orang tidak dikenal dan sangat asing keluar masuk setiap harinya. Seiring dengan perubahan fungsi perkampungan dari wilayah permukiman warga menjadi wilayah bisnis, pergantian orang yang masuk dalam wilayah tersebut pun menjadi lebih cepat dan terbuka sehingga sulit untuk dikendalikan. Dengan demikian, kondisi keamanan di sekitar wilayah tersebut pun menjadi menurun dan memungkinkan untuk terjadinya tindak kriminal.

“Jadi sering banyak pencuri, kemudian apa namanya, ya kehidupan anak-anak kos yang seharusnya tidak boleh masuk ke kamar perempuan ke tempat yang cowok, itu kan pergaulan bebas mulai berdampak. Kemudian juga, apa lagi ya yang saya lihat. Ya, karena orangnya kemudian ganti ya”, kata Bu Novi.

Selain menurunnya keamanan wilayah kampung Sekayu, perubahan nilai dan norma sosial pun menjadi salah satu hal yang diresahkan warga. Nilai dan norma sopan santun seperti tidak boleh membawa lawan jenis masuk ke kamar pun mulai terasa berubah seiring dengan kemunculan kos-kosan. Meskipun

ditetapkan peraturan tidak boleh membawa tamu lawan jenis masuk ke kamar telah ditetapkan, hal tersebut tetap terjadi tidak dapat dikontrol seiring dengan perubahan yang terjadi dalam kampung Sekayu. Gaya hidup anak kos-kosan yang berbeda dengan nilai dan norma sosial yang sebelumnya berlaku pun membawa keresahan bagi warga.

Kehidupan anak-anak kos yang seharusnya tidak boleh masuk ke kamar perempuan atau sebaliknya. Perubahan-perubahan serta dampak yang hari ini telah terasa kepada kampung meraka adalah hal-hal seperti itu.

Jika ditinjau dari segi ekonomi, warga mendapatkan keuntungan dengan perubahan situasi kampung kota karena berubah mata pencaharian. Jika sebelumnya banyak dari mereka yang dahulu bekerja sebagai buruh atau pedagang, maka hari ini sebagian dari mereka telah menjadi karyawan, pegawai dan wiraswasta. Selain dikarenakan perubahan profesi, pendapatan ekonomi warga pun meningkat dengan ramainya usaha yang dijalani. Situasi kampung yang ramai diakses oleh orang membantu warga untuk memperoleh pendapatan lewat membuka usaha kecil menengah.

1.3. Bergesernya Ngesti Pandawa dan GRIS

Pelu diketahui bahwa di Kota Semarang terdapat sebuah perkumpulan kesenian wayang orang (WO) yang dikenal dengan nama Ngesti Pandawa (Ngesti Pandowo). Dan perlu di ketahui juga bahwa Ngesti Pandawa merupakan satu dari tiga perkumpulan kesenian tradisional Wayang Orang profesional yang bertahan di Indonesia, di samping Wayang Orang Sriwedari di Taman Sriwedari Solo dan Wayang Orang Bharata. Untuk keberadaannya, Ngesti Pandawa saat ini melakukan pentas Wayang Orang bertempat di Gedung Kesenian Ki Narto Sabdho dalam

kompleks Taman Budaya Raden Saleh (TBRs) yang ada di Jl. Sriwijaya No.29 Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

Sejarah Ngesti Pandawa Dan GRIS

Ngesti Pandawa didirikan di Madiun oleh Sastro Sabdo pada tanggal 1 Juli 1937 dengan tujuan untuk membangkitkan kembali kehidupan wayang orang panggung (Wikipedia). Wayang Orang Panggung merupakan perpaduan Wayang Orang Keraton (sering juga disebut wayang orang pendhapa) dengan teater barat. Keberadaan wayang orang Ngesti Pandawa dimaksudkan juga untuk melestarikan kesenian wayang orang, serta menanamkan rasa cinta pada seni tradisi. Pertunjukan wayang orang juga memberikan hiburan pada masyarakat.

Sejak awal berdirinya, wayang orang Ngesti Pandawa sudah disukai oleh masyarakat. Tidak hanya kalangan masyarakat Jawa tetapi juga orang-orang Belanda dan keturunan Tionghoa juga menyukai seni pertunjukan tersebut. Dengan demikian, sejak dahulu wayang orang merupakan seni pertunjukan yang dapat dinikmati oleh semua kalangan baik pribumi maupun non pribumi.

Menurut Umar Kayam (1983: 131 dan 1981: 93), Ngesti Pandawa pada dasarnya merupakan suatu teater kitsch, yaitu suatu teater yang dikemas sebagai suatu komoditas komersial yang ditunjukkan bagi khalayak kota. Sebagai sebuah teater kitsch, maka eksistensi Ngesti Pandawa ditentukan oleh kemampuan untuk terampil apik inovatif, spektakuler dan glamour. Untuk mempertahankan eksistensinya itu, Ngesti Pandawa harus benar-benar mengelola

Ngesti Pandawa telah mengalami perjalanan sejarah yang panjang selama berada di Kota Semarang. Dalam melakukan pementasannya, Ngesti Pandawa telah beberapa kali mengalami perpindahan tempat. Pada tahun 1954, Ngesti Pandawa menempati gedung baru di kompleks gedung GRIS (Gedung Rakyat Indonesia

Semarang) di jalan Pemuda 116 (saat ini Paragon City Mall Semarang). Pada tahun 1960 sampai awal tahun 1970, Ngesti Pandawa mengalami masa puncak kejayaan dan menjadi ikon Kota Semarang di bawah kepemimpinan Sastro Sabdo dan Narto Sabdo. Ngesti Pandawa menjadi kiblat bagi perkumpulan wayang orang yang ada pada jamannya. Teknik dekorasi, iringan, kostum, koreografi, dan trik panggung menjadi acuan bagi perkumpulan wayang orang lainnya.

Popularitas Ngesti Pandawa menarik perhatian Presiden Sukarno. Pada saat terjadi bencana alam Gunung Merapi meletus 1953, Ngesti Pandawa pentas dalam rangka pengumpulan dana. Presiden Soekarno saat itu memanggil Ngesti Pandawa untuk pentas di Istana Merdeka di Jakarta dan Istana Negara di Bogor. Hal ini tentunya merupakan kebanggaan tersendiri dari wayang orang Ngesti Pandawa. Bagi suatu perkumpulan kesenian khususnya wayang orang pentas di Istana Negara adalah sesuatu yang jarang terjadi. Oleh karena prestasinya, Ngesti Pandawa pada tahun 1962 dipanggil Presiden Sukarno ke Istana untuk menerima anugerah penghargaan seni berupa piagam Wijayakusuma dari Presiden RI.

Lalu kompleks GRIS kemudian harus dipindahtangkan oleh pemerintah setempat ke pihak ketiga. Ngesti Pandawa tidak memiliki gedung pertunjukan lagi, dan harus pindah ke kompleks TBRS dan menempati sebuah gedung pertunjukan teater, selama dua tahun. Tahun 1996 pindah ke Taman Majapahit dan membentuk Yayasan Wayang Orang Ngesti Pandawa. Pada tahun 2001 Ngesti Pandawa diberi kesempatan oleh pemerintah daerah setempat untuk menggunakan sebuah gedung pertunjukan di TBRS sampai sekarang. Pada masa sekarang ini Ngesti Pandawa berhak mengadakan pementasan di TBRS selama tiga hari dalam

seminggu. Namun secara rutin, pementasan hanya dilakukan pada hari Sabtu mulai jam 8 malam.

Bagaimana GRIS Hari Ini?

Keberadaan GRIS hari ini telah berpindah tempat. Pada awalnya Gedung Rakyat Indonesia Semarang tersebut berada di Jl.Pemuda, tepat di depan Kampung Sekayu. Dan perlu di ketahui bahwa GRIS merupakan bangunan bersejarah.

Pada November 1996, GRIS diambil-alih oleh pihak ketiga. Pemerintah Kota Semarang memindah tangankan bangunan tersebut kepada Bank Pembangunan Daerah Jateng. Termasuk Ngesti Pandawa di dalamnya. Nasib perkumpulan wayang orang Ngesti Pandowo yang sudah berusia 43 tahun, nyatanya harus terusir dari kota Semarang. Mereka menghadapi kenyataan bahwa gedung pentasnya di GRIS akan dijadikan pusat bisnis, yakni Mall Paragon. Dalam kondisi tersebut diketahui bagaimana keberadaan gedung bersejarah saja tidak akan cukup untuk mempertahankan suatu keberlanjutan wilayah. Terutama apa yang di alami oleh orang-orang biasa atau rakyat kecil.

Seperti apa yang ada dalam perspektif Marx memandang konflik, ia mengembangkan konflik dengan beberapa konsepsi yakni konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan dan negara dimana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Negara tentunya memiliki kepentingan, oleh karenanya hal ini dimanfaatkan oleh para kaum borjuis. Kelompok borjuis yang tentunya dapat memiliki dan juga memegang kendali atas alat-alat produksi tentu meminta legitimasi atau bukti kepemilikan yang sah. Bukti kepemilikan ini bisa didapatkan melalui negara. Oleh karena itu, kelompok borjuis memiliki kekuasaan untuk menentukan apa yang akan diproduksi dan didistribusi.



Gambar 4.9
Gedung Rakyat Indonesia Semarang (GRIS)
(Sumber: Internet)



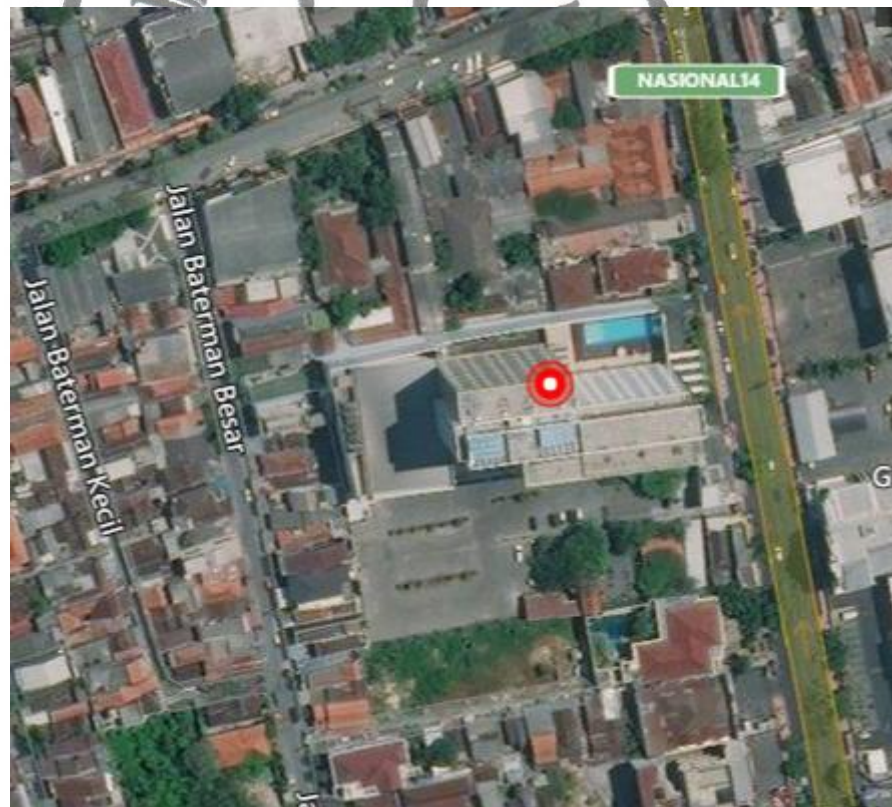
Gambar 4.10
Mall Paragon
(Sumber: Internet)

Bertolak dari hilangnya GRIS pun bagaimana dengan keberadaan Ngesti Pandawa hari ini? Ketika mereka harus hijrah ke Taman Budaya Raden Saleh (TBRs), yang jauh dari kota, penonton pun semakin sulit untuk menikmati pertunjukan mereka,

jauh dari kota serta semakin sedikit dukungan dari pemerintah dalam mendukung kesenian wayang orang (WO) tersebut.

2. Kampung Jayenggaten

Serupa dengan apa yang terjadi di Kampung Sekayu. Kampung Jayenggaten hilang begitu saja ketika Hotel Gumaya berdiri pada tahun 2006. Kampung itu telah menjadi lahan parkir besar bagi tamu hotel. Pada awalnya Kampung Jayenggaten merupakan sebuah wilayah tempat tinggal yang berada di Kelurahan Kembangsari, Kecamatan Semarang Tengah. Sekitar 30 bangunan yang berada di Jl. Gajahmada itu lenyap tak terlihat, padahal dahulunya adalah kampung yang dihuni oleh kaum santri.



Gambar 4.11

Kampung Jayenggaten dan Hotel Gumaya, via Satelit

(Sumber: Google Maps)

Namun jika hari ini ditanya dalam eksistensinya yang disandingkan dengan nama Hotel Gumaya maka kampung Jayenggaten telah

tenggelam keberadaannya. Berawal pada tahun 2005 semua telah berubah. Tanah seluas 5.440 m² mengalami persengkataan dengan pihak hotel. Sengketa tanah yang terjadi beberapa tahun lalu dengan sekitar tiga puluhan rumah warga yang berstatus sewa dibongkar, dua rumah yang tanahnya berstatus HM itu tetap bertahan. Namun pihak Gumaya yang membeli tanah di Kampung Jayenggaten tersebut kemudian memasangnya dengan pagar beton setinggi dua meter. Di lokasi yang dulunya merupakan Kampung Jayenggaten ini masih tersisa dua rumah yang memiliki status HM dan kini rumah tersebut kosong karena penghuni dari rumah tersebut pergi dan tidak mau menempati rumah tersebut lagi. Sekarang sisa rumah di kampung Jayenggaten hanya tinggal 2 rumah saja.

2.1 Tasripin, Sang Tuan Tanah

Tasripin adalah salah satu pemilik tanah pribadi terbesar di Semarang. Hal tersebut di capai berkat orang tua (Tarsimin) beserta kakeknya (Saridin). Keduanya adalah pengusaha kulit yang memasok barang-barang kepada Angkatan Darat India Timur Belanda seperti sepatu bot, pelana, dan tali kekang. Kemudian berangkat dari sana Tasripin melanjutkan bisnis ini dan karena tempat dimana ia tinggal sekaligus menjalankan usahanya maka kemudian wilayah tersebut dikenal sebagai Kampung Kulitan (kulit). Belakangan, Kampung Kulitan dikenal sebagai 'kerajaan Tasripin' karena banyak kerabat dan keturunannya membangun rumah mereka di sana. Bahkan sampai sekarang, beberapa dari mereka masih tinggal di Kampung Kulitan.

Tasripin juga berurusan dengan komoditas lain, yaitu kopra dan kapuk. Dari bisnis ini Tasripin menjadi sangat kaya, dan ia menginvestasikan keuntungannya di *real estate*. Dia menjadi tuan tanah dan mengumpulkan uang sewa dari penyewa yang tinggal di tanahnya. Bersama dengan pengusaha Cina Oei Tiong Ham, Tasripin adalah salah satu pemilik tanah pribadi terbesar di

Semarang. Dalam menjalankan bisnisnya, Tasripin, seperti Oei Tiong Ham, melakukan sesuatu yang tidak pernah terjadi pada masa itu untuk orang non-Eropa: ia mempekerjakan pengacara Belanda untuk menangani urusan hukumnya. Properti Tasripin terutama terletak di bagian tengah dan utara Semarang, yaitu di kampung-kampung berikut: Kulitan (tempat ia dan keluarga besarnya tinggal), Gandekan, Gedong Bobrok, Jayenggaten, Kapatihan, Pesantren, Sayangan, Kebon Kenap, Wotprau, Demangan, Bang Inggris, Kampung Cokro dan Kampung Bedug. Tasripin juga memiliki beberapa rumah besar di sepanjang Karenweg (sekarang Jalan Komisaris Polisi Maksum) yang sebagian besar disewa oleh penyewa Cina dan Belanda.

Hingga kini, beberapa dari banyak keturunan Tasripin (di antaranya 'Kongsi 19', kelompok yang terdiri dari 11 putra dan 8 putri Tasripin) masih secara teratur mengumpulkan tanah dan sewa rumah dari properti-properti ini. Menurut Budiman (1976) Tasripin memiliki empat balita. Namun, Tasripin tidak mempraktikkan poligami. Dia mengambil istri baru hanya setelah kematian yang sebelumnya. Tasripin sendiri memiliki gaya hidup yang relatif sederhana, terutama dibandingkan dengan Oei Tiong Ham yang memiliki setidaknya delapan istri, banyak selir dan 26 anak. Tasripin adalah seorang dermawan dan penikmat seni yang terkenal. Dia membangun sumur di kampungnya sendiri dan juga di kampung lain untuk menyediakan air bagi penduduk. Dia berkontribusi pada masjid-masjid di dalam dan luar Semarang (bahkan sejauh Makassar di Sulawesi). Dan sebagai orang yang berbisnis barang-barang kulit, Tasripin memiliki ketertarikan khusus pada wayang kulit (teater kulit menggunakan boneka kulit) dan memiliki beberapa set wayang kulit berkualitas tinggi dan ansambel gamelan. Tasripin meninggal pada tanggal 9 Agustus

1919 dan jenazahnya dimakamkan di Pemakaman Bergota di Semarang (Rahardjo, 2010).

2.2 Keberadaan Kampung Jayenggaten

Kampung Jayenggaten adalah pemukiman yang terletak di pusat kota Semarang. Kemunculannya adalah hasil dari semakin pentingnya Semarang sebagai salah satu pusat ekonomi dan politik terpenting di Jawa. Keberhasilan Semarang sebagai pelabuhan dan sebagai pusat perdagangan dan administrasi pada awal abad kedua puluh membawa serta masuknya orang-orang, yang sebagian besar adalah orang Indonesia dari semua bagian Jawa dan pulau-pulau luar. Orang-orang ini menetap di bekas desa yang telah menjadi daerah padat; apa yang sekarang dikenal sebagai kampung (tidak direncanakan, permukiman perkotaan spontan), seperti Kampung Jayenggaten. Dengan perluasan wilayah perkotaan Semarang, kampung-kampung ini secara fisik (jika tidak secara ekonomi dan sosial) tidak dapat dipisahkan dari kota. Selama rezim Suharto, yang melihat bisnis besar sebagai kunci pembangunan ekonomi, kampung sering dibongkar (dan penduduknya diusir) digantikan oleh penggunaan yang lebih menguntungkan secara ekonomi, seperti jalan tol, pabrik, blok kantor, pusat perbelanjaan, hotel, dll. Meskipun Suharto telah digulingkan selama lebih dari satu dekade, penggusuran seperti itu terus terjadi di kota-kota Indonesia.

Dalam penuturan Pak Harianto, seorang sejarawan Semarang yang berhasil di temui oleh peneliti menjelaskan bahwa sejarah Kampung Jayenggaten dimulai ketika Tasripin yang berperan sebagai pemilik tanah setuju untuk menyewakannya kepada beberapa penyewa, yakni orang-orang yang akan menetap di Jayenggaten pada akhirnya nanti. Dapat dikatakan masa tersebut berada pada tahun 1890-an. Warga menyewa tanah tersebut dan membangun rumah sederhana yang terbuat dari bambu dan kayu. Para penyewa pertama ini kemudian mewariskan bangunan-

bangunan ini kepada keturunan mereka. Beberapa rumah (tetapi bukan tanah, yang masih dimiliki oleh keluarga Tasripin) kemudian dijual antara tahun 1905 dan 1946. Saat ini (mantan) penduduk Jayengaten adalah penduduk generasi ketiga dan keempat.

Pada April 1963, putri Tasripin, Nok Tas Aisiyah, diberikan Hak Milik (kira-kira setara dengan gelar Freehold dalam yurisdiksi hukum umum Inggris), menjadikannya pemilik sah Kampung Jayengaten. Pada tahun 1974, tanah itu dibagi menjadi tiga bidang. Dua bidang tanah (masing-masing judul Hak Milik 139 meter persegi dan 116 meter persegi) dijual dan Aisiyah mempertahankan plot yang tersisa. Aisiyah kembali menjual sebagian tanahnya. Kali ini dibagi menjadi lima bidang Hak Milik. Empat plot dijual, Aisiyah menjaga sisa 4.210 meter persegi. Pada tahun 1989, sembilan anak Aisiyah, di antaranya Tasliman dan Taslimin, mewarisi tanah tersebut. Mereka kemudian menjual 136 meter persegi warisan mereka. Sisanya 4.074 meter persegi terus disewa oleh penyewa, tetapi pada tahun 1996 pewaris Aisiyah menjual tanah yang tersisa, termasuk rumah-rumah di atasnya, kepada Hendra Soegiarto. Hendra Soegiarto adalah presiden direktur PT Gumaya Graha Mulia, sebuah perusahaan konstruksi dan pengembangan properti dalam Grup Gumaya. Soegiarto adalah pengusaha yang memiliki koneksi baik yang memainkan peran yang sangat penting dalam konflik Jayengaten.

2.3 Mereka Yang Bernegosiasi

Dalam Rahardjo (2010), direktur PT. Gumaya Graha Mulia yakni Hendra Soegiarto selaku pemilik Hotel Gumaya diketahui telah bernegosiasi dengan Tasliman (cucu Tasripin atau anak dari Aisiyah). Soegiarto memberi sejumlah uang sebagai tanda awal kesepakatan dari total sekitar lima ratus jutaan dan berjanji akan

dibayarkan setelah rumah-rumah dipindahkan. Selanjutnya, warga Kampung Jayenggaten diperintahkan untuk meninggalkan Jayengaten oleh kepala kelurahan Kembangsari pada saat itu. Warga diberi uang sekitar dua ratus ribu per rumah tangga sebagai "tali asih". Namun warga menolak untuk menerimanya.

Pengacara Soegiarto kemudian mengeluarkan pemberitahuan hukum yang memerintahkan penduduk Jayengaten untuk mengosongkan tanah yang mereka tempati dalam sepuluh hari. Orang-orang kembali menolak, dengan alasan perjanjian sewa antara mereka dan ahli waris Tasripin masih berlaku. Namun, masalahnya adalah bahwa tidak ada perjanjian tertulis (meskipun perjanjian sewa tidak tertulis tersebut diperbolehkan berdasarkan Hukum Perdata Indonesia) kecuali satu yang dimasukkan bersama oleh Achmad Masudi dan Umar Djunadi dengan ahli waris Tasripin (Amat Tas Gondo Tedjomojo dan Nok Tas Aisijah) tertanggal 10 Agustus 1962. Dokumen tertulis ini menetapkan bahwa sewa bulanan adalah Rp.166,- per bulan, tetapi tidak disebutkan kapan perjanjian akan berakhir. Namun, dikatakan bahwa penyewa akan setuju untuk pergi jika pemilik membutuhkan tanah, dengan syarat mereka diberi pemberitahuan tiga bulan. Warga Jayengaten masih memiliki kwitansi sewa yang telah mereka bayar. Tanggal penerimaan tertua dari tahun 1918 dan yang terbaru dari tahun 1994. Sebagian uang sewa dikumpulkan setiap tahun oleh keluarga Tasripin, lainnya setiap dua tahun dan lima tahun (menggunakan sistem yang disebut ambilan, dari ambil: untuk mengambil, untuk mengumpulkan). Namun, setelah 1994, tidak ada seorang pun dari keluarga Tasripin yang datang untuk mengambil uang sewanya. Penduduk juga memiliki izin membangun untuk rumah mereka dan membayar pajak properti dan pajak terkait lainnya (semua menggunakan nama mereka sendiri).

Kepemilikan dokumen yang disebutkan di atas memang tidak membuktikan bahwa penghuninya adalah pemilik tanah. Namun, dokumen-dokumen tersebut, ditambah fakta bahwa mereka memiliki KTP, membuktikan bahwa mereka adalah penduduk legal, bukan penghuni liar, meskipun mungkin penuh sesak dan kurang memiliki beberapa layanan dasar. Karena alasan itu, masa sewa mereka tidak dapat diputus secara sewenang-wenang oleh pemilik tanah. Setiap perubahan dalam perjanjian harus dilakukan oleh kedua belah pihak: penyewa serta pemilik tanah. Selain itu, izin bangunan adalah bukti bahwa mereka adalah pemilik struktur rumah. Tasliman atau anggota keluarganya yang lain tidak memiliki hak untuk menjual rumah-rumah ini.

Setelah sepuluh hari berlalu dan orang-orang masih belum pindah, pengacara Soegiarto mengajukan tuntutan hukum pidana dengan menuduh 23 penduduk Jayenganten secara ilegal menduduki tanahnya. Dengan kecepatan yang luar biasa, polisi segera membuat mereka menjadi tersangka. Dengan mengisi seorang penjahat alih-alih gugatan perdata, Soegiarto ingin mengkriminalkan orang-orang dengan membuat mereka dilihat sebagai perampas tanah (Herwati, 2009).



Gambar 4.12

Koran Warga Jayengaten Mengadu Ke Dewan

(Sumber: Dokumen pribadi Pak Bagyo, koran 25 Feb 2005)

Sementara itu warga Jayengaten mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Mereka menuntut pembatalan izin bangunan untuk membangun hotel yang berdekatan dengan Kampung Jayengaten yang dikeluarkan untuk PT Gumaya Graha Mulia. Alasan yang diberikan adalah bahwa Walikota Semarang telah mengeluarkan izin sebelum analisis dampak lingkungan bahkan dilakukan. Terdakwa dalam kasus ini adalah Walikota Semarang. Pengacara Soegiarto diminta ikut campur dalam kasus ini. Permintaan itu dikabulkan dan PT Gumaya Graha Mulia menjadi terdakwa kedua. Ini memungkinkan Soegiarto dan pengacaranya untuk bekerja sama dengan pengacara Walikota agar izin bangunan tidak dibatalkan (Herwati, 2009). Pada 10 Mei 2005 dan 2 Juni 2005 pengadilan pidana memutuskan bahwa penduduknya bersalah. Status mereka sekarang adalah penghuni ilegal tanah tempat rumah mereka berdiri. Warga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sementara itu, PT Gumaya Graha Mulia memulai pembangunan hotel, meskipun pengadilan administrasi belum memberikan putusan. Ini adalah awal dari "strategi non-hukum" oleh Soegiarto dan PT Gumaya Graha Mulia dalam upaya mereka mengusir penduduk Jayengaten (Herwati, 2009).

Pada bulan Desember 2005, Mahkamah Agung menolak kasasi. Pada Agustus 2006 Abdul Hadi meminta peninjauan. Namun, ini tidak dilanjutkan karena PT Gumaya Graha Mulia/Hendra Soegiarto meminta proses mediasi. Pihak-pihak yang bertikai sepakat untuk tidak melanjutkan proses peninjauan. Setelah beberapa pertemuan pada bulan Mei dan Juni 2006 dimediasi oleh Wakil Walikota Semarang, disepakati bahwa

penduduk akan diberikan kompensasi sebesar satu juta dua ratus ribu rupiah per meter persegi.

2.4 Berganti Wajahnya Kampung Jayenggaten

Pada bulan April 2005 tumpukan beton pertama didorong ke tanah. Alat berat mulai berdatangan. Pekerjaan konstruksi terus berlanjut sepanjang waktu. Ini memiliki efek serius pada kehidupan sehari-hari komunitas Jayenggaten. Getaran tak henti-hentinya dari tumpukan 30 meter yang didorong ke bumi telah menyebabkan dinding retak dan langit-langit jatuh. Suara peralatan membuat anak-anak ketakutan dan menyulitkan mereka untuk berkonsentrasi dalam belajar. Ditemukan juga bahwa sumur, sumber air utama masyarakat, mengandung sulfida (mineral yang terdiri dari beberapa logam yang dikombinasikan dengan belerang). Warga curiga bahwa sumber sulfida adalah air limbah yang bocor dari proyek hotel. Bagaimanapun, sumur mereka dianggap tidak berguna dan orang-orang harus bergantung pada penjual untuk persediaan air mereka (Herwati, 2009).

Disisi lain tidak lama setelah menerima kompensasi, 45 rumah tangga meninggalkan Jayenggaten. Beberapa pindah ke tempat lain di Semarang, yang lain di luar kota. Namun, sebelum mereka pergi, mereka mengadakan pertemuan perpisahan sederhana, mengundang beberapa orang dari luar kampung. Di antara mereka adalah Wakil Walikota yang memberikan pidato perpisahan.

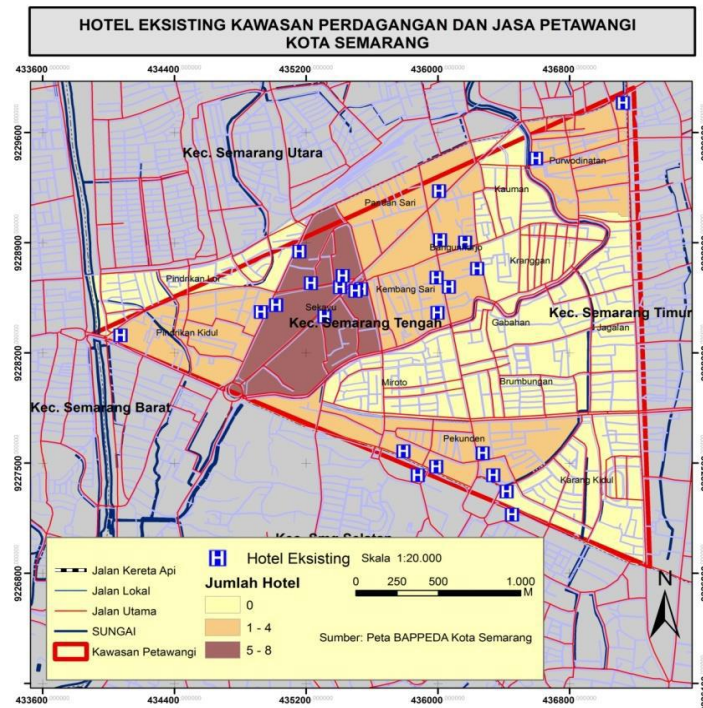
Namun, ini bukan akhir dari cerita. Selain dari 45 rumah tangga yang sudah pergi, masih ada beberapa rumah tangga yang tersisa di Jayenggaten. Mereka adalah yang memiliki tanah dan juga rumah mereka, tidak seperti para penyewa yang hanya memiliki rumah. Mereka tetap menjadi hambatan dalam pengembangan parkir mobil hotel.

Pada 16 Januari 2007 PT Gumaya Graha Mulia menutup jalan akses ke rumah-rumah yang tersisa, hanya menyisakan jalan setapak 1 meter dari jalan setinggi 3,5 meter sebelumnya. Menanggapi protes, pengacara Soegiarto menyatakan bahwa jalan itu adalah bagian dari tanah yang dijual oleh keluarga Tasripin dan oleh karena itu Soegiarto memiliki hak untuk menutupnya. Pagar kemudian dibangun di sekitar rumah-rumah yang tersisa, hampir mengisolasi dan memenjarakan warga. Semua aksi teror ini dimaksudkan untuk membuat hidup orang-orang menjadi sulit, yang Soegiarto berharap pada akhirnya akan memaksa mereka untuk menjual properti mereka kepadanya. Namun, hingga kini, warga belum menyerahkan properti mereka. Sementara itu, orang-orang yang pindah masih memiliki ikatan emosional dengan Jayenggaten. Para wanita berusaha bertemu di sana setidaknya setiap dua bulan. Bahkan, orang-orang merasa bahwa ikatan di antara mereka telah menjadi lebih kuat setelah melewati masa-masa sulit bersama. Namun, mereka juga punya cerita sedih untuk diceritakan. Beberapa orang tua yang lahir dan tinggal hampir sepanjang hidup mereka di Jayenggaten merasa sulit untuk beradaptasi dengan rumah baru mereka dan menjadi sakit setelah harus pindah. Kisah paling tragis adalah tentang orang yang masih datang setiap hari ke Jayenggaten dan hanya duduk di dekat gerbang masuk bekas kampung halamannya (Herwati, 2009).

C. Hadirnya Mall Dan Hotel

Kawasan BWK I memang menjadi wilayah pusat perdagangan dan jasa di Semarang. Perkembangan industri di Petawangi (Peterongan, Tawang, Siliwangi) yang lebih luas mengakibatkan tumbuhnya pusat-pusat kawasan komersial baru di dalamnya. Hotel sebagai salah satu komponen perdagangan dan jasa yang sangat terlihat pada kurun 10-15 tahun ke belakang, khususnya di Semarang. Hotel berkembang akibat adanya perkembangan aktivitas industri dan bisnis, terlebih juga dapat dikatakan sebagai penyokong

pariwisata. Hotel di kawasan Petawangi memiliki 70% dari total pendapatan yang diterima dari seluruh kawasan yang ada di Kota Semarang.



Gambar 4.13
Hotel Eksisting Pusat Perdagangan dan Jasa Petawangi
(Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2014)

Jika pertumbuhan dan perkembangan kota diwujudkan sebagai bentuk arti dari visi dan misi kota maka kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Kota Semarang sebagai Ibukota Propinsi Jawa Tengah memiliki visi yang berlandaskan kondisi kota dan nilai historis yang dimilikinya. Penentuan visi ini mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan penelusuran jejak historis Kota Semarang sebagai kota niaga di mana pada jaman dahulu pernah dinyatakan sebagai Kota Niaga terbesar kedua sesudah Batavia. Berdasar sejarah sebagai kota niaga tersebut dan didukung oleh analisis potensi, faktor-faktor strategis yang ada pada saat ini serta proyeksi pengembangan ke depan, maka dirumuskan visi Kota Semarang

yaitu: “Terwujudnya Semarang kota perdagangan dan jasa, yang berbudaya menuju masyarakat sejahtera”. Visi tersebut memiliki empat kunci pokok yakni Kota Perdagangan, Kota Jasa, Kota Berbudaya, dan Masyarakat yang Sejahtera.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatur perkembangan Kota Semarang yang sesuai dengan visi misi serta untuk menghadapi pertumbuhan yang pesat adalah diberlakukannya pembangunan pada tingkatan bagian wilayah kota (BWK). Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031 dikatakan bahwa BWK adalah suatu kawasan fungsional atau kawasan yang memiliki kemiripan fungsi ruang. Kota Semarang terbagi menjadi 10 bagian wilayah kota dengan masing-masing BWK memiliki fungsi kawasannya tersendiri. Sesuai dengan visi misi Kota Semarang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, BWK 1 merupakan pusat kawasan yang memiliki fungsi perkantoran, perdagangan, dan jasa dengan Kawasan segitiga Pandama (Pemuda, Pandanaran, Gajahmada) serta Simpang Lima sebagai pusat kegiatannya atau CBD (Central Business District). BWK 1 ini mencakup Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Selatan, dan Semarang Timur dengan luasan 2.223 Ha. Saat ini kawasan CBD Pandama telah berkembang menjadi pusat perdagangan dan jasa yang lebih luas menjadi Kawasan Petawangi (Peterongan-Tawang-Siliwangi).

Kawasan Petawangi sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kota Semarang terus mengalami pertumbuhan yang pesat. Saat ini pemerintah Kota Semarang sendiri sedang menggalakkan investasi skala nasional dan Internasional dari penanaman modal dalam negeri maupun asing yang ditujukan pada kawasan pusat perdagangan dan jasa Petawangi. Data yang berhasil dihimpun mencatat berbagai proyek besar perhotelan akan dibangun di kawasan pusat kota.

Kota merupakan suatu kesatuan wilayah administratif yang memiliki tingkat kepadatan bangunan dan manusia yang tinggi di mana sebagian besar penduduknya bekerja bukan pada sektor pertanian. Secara lebih kompleks dalam sudut pandang morfologis, suatu kota dapat didefinisikan sebagai suatu

daerah tertentu dengan karakteristik pemanfaatan lahan non pertanian, pemanfaatan lahan di mana sebagian besar tertutup oleh bangunan baik yang bersifat residensial maupun non-residensial, kepadatan bangunan permukiman yang tinggi, memiliki pola jaringan jalan yang kompleks, dalam satuan permukiman yang kompak (contiguous) dan relatif lebih besar dari satuan permukiman pedesaan di sekitarnya (Yunus, 2005).

No	Nama Hotel	Alamat	Kelurahan
1	Gumaya Tower Hotel	Jl Gajah Mada No 59-61	Kelurahan Kembang Sari
2	Ciputra	Simpang Lima	Kelurahan Pekunden
3	Novotel	Jalan Pemuda No 123	Kelurahan Sekayu
4	Crowne Plaza	Jalan Pemuda No. 116-118	Kelurahan Sekayu
5	Santika Premiere	Jalan Pandanaran No. 116-120	Kelurahan Pekunden
6	Horison	Jl. KH Ahm ad Dahlan No.2	Kelurahan Karang Kidul
7	Pandanaran	Jl Pandanaran No. 58	Kelurahan Pekunden
8	Siliwangi	Jl MGR Soegijapnoto No. 61	Kelurahan Pendrikan Kidul
9	New Metro	Jl KH Agus Salim No 2-4	Kelurahan Purwodinatan
10	Quest	Jl Plampitan No. 37-38	Kelurahan Bangunharjo
11	Dafam	Jl Imam Bonjol	Kelurahan Sekayu
12	Semesta Heritage	Jl KH Wahid Hasyim No 125-127	Kelurahan Bangunharjo
13	MG Suites	Jl Petempen Malang No 294	Kelurahan Kembang Sari
14	Ibis	Jl. Gajah Mada No 172	Kelurahan Pekunden
15	Holiday Inn	Jl Ahm ad Yani No 145	Kelurahan Pleburan
16	Surya	Jl Imam Bonjol 28	Kelurahan Pandan Sari
17	Quirin	Jl Gajah Mada 44-52	Kelurahan Bangunharjo
18	Amaris	Jl Pemuda No 138	Kelurahan Sekayu
19	Whiz	Jl Kap. Piere Tendean No 9	Kelurahan Sekayu
20	Ibis Budget	Jl Kap Piere Tendean	Kelurahan Sekayu
21	Citradream	Jl Imam Bonjol No 187	Kelurahan Pindrikan Kidul
22	Gajah Mada 100	Jl Gajah Mada No 100	Kelurahan Bangunharjo
23	@HOM	Jl Pandanaran No 119	Kelurahan Mugasari
24	Merbabu	Jl Pemuda No 122-124	Kelurahan Sekayu

Tabel 4.4

Daftar Hotel Berbintang di Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa Petawangi

(Sumber: Dinas Pariwisata Kota Semarang, 2014)

Namun jika di lihat benar bahwa Kota Semarang yang sedang menggalakkan investasi skala nasional dan Internasional dari penanaman modal dalam negeri maupun asing yang ditujukan pada kawasan pusat perdagangan dan jasa maka imbasnya adalah wilayah permukiman penduduk

yang harus menjadi korban dari kebijakan tersebut. Kampung Sekayu dan Jayenggaten menjadi contoh real nyata dalam keberalihan fungsi wilayah di Semarang. Dengan cara memaksa mereka para pemilik modal mengambil tanah yang sudah ditempati oleh warga masyarakat. Kampung kota sebagai tempat tinggal dan pemilik sah dari warga kota harus terpaksa menyingkir dari wilayahnya. Seperti warga masyarakat Kampung Jayenggaten dan Sekayu.

“Akhirnya ya mereka pindah ke daerah pinggiran karena dengan harga segitu, hanya sekian ratus juta maka mereka ke daerah pinggiran semua, tapi andai kata ada yang ditengah itu berarti mereka patungan, karena uang 300jt itu dah tidak ada rumah ditengah”, ujar pak Arief.

Warga masyarakat Kampung Sekayu dan Jayenggaten sendiri pun pada mulanya tidak membiarkan begitu saja memberikan apa yang menjadi milik mereka, tempat kelahiran mereka. Sebab bagi mereka kampung bukan hanya sebagai tempat tinggal, melainkan juga sebagai segalanya untuk keluarga, anak cucu dan sebagai sejarah. Pada prosesnya, advokasi dan konsolidasi pun dilakukan, seperti halnya yang terjadi di Kampung Sekayu. Aktor atau sesepuh yang menjadi penggerak bagi kampungnya memberikan andil di setiap keputusan saat bernegosiasi dengan pihak hotel. Kala itu dibentuklah tim 9, yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, seperti aktor kampung pak Arief, ketua RT, pihak hotel, kepala kelurahan, kepolisian, preman, pemuka agama, dan beberapa lainnya.

Peraturan tentang Bagian Wilayah Kota I (BWK I) Semarang memang telah diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2004 dimana BWK I terdiri dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Timur, dan Semarang Selatan. Fungsi kawasan ini adalah sebagai pusat kegiatan perdagangan, jasa, dan perkantoran di Kota Semarang dengan luasan masing-masing kecamatan yakni Kecamatan Semarang Tengah sebesar 604,997 ha; Kecamatan Semarang Timur sebesar 770,255 ha; dan Kecamatan Semarang Selatan sebesar 848,046 ha. Akibat dari kebijakan tersebut maka secara

otomatis kampung-kampung kota terkena dampak paling depan. Kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi berpindahnya kampung.

Ketika Sekayu dan Jayenggaten hilang, maka kemudian yang terjadi adalah munculnya kampung-kampung baru. Mereka yang harus berada pada wilayah dan karakteristik keadaan yang berbeda harus mampu untuk beradaptasi kembali. Secara sederhana saja di saat mereka harus bertemu dengan tetangga baru. Kemudian wilayah mata pencaharian yang harus mereka adaptasikan kembali, baik dengan pekerjaan baru ataupun mata pencaharian mereka yang harus berjarak sangat jauh di saat warga masyarakat pindah ke daerah pinggiran. Tidak sedikit warga kampung Sekayu dan Jayenggaten harus pindah menuju kota atas atau Semarang bagian atas.

“Ya mau gimana lagi mas, dapetnya di daerah Ungaran sini karena harga tanah pun masih murah. Cuma sayangnya ya harus cari pekerjaan baru, kemarin di sana bisa dagang, disini engga bisa mas karena jarang pembeli, akhirnya ya terpaksa jadi buruh pabrik”, ujar Pak Ratno.